



---

## Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Robial<sup>1</sup>, Ana Fatimah Fitriani<sup>2</sup>, Heni Noviarita<sup>3</sup>, Romlah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedato, Kota Bandar Lampung,

Lampung 35142

Email : [robial821@gmail.com](mailto:robial821@gmail.com)<sup>1</sup>, [anafatimahf20@gmail.com](mailto:anafatimahf20@gmail.com)<sup>2</sup>, [heninoviarita@radenintan.ac.id](mailto:heninoviarita@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>,  
[romlah@radenintan.ac.id](mailto:romlah@radenintan.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the management of education financing as one of the important components in the sustainability and improvement of the quality of education. Education financing includes the entire process of planning, implementation, supervision, and evaluation of the management of education funds so that they can be used effectively and efficiently. The method used in this study is a qualitative study with a descriptive-analytical approach, based on a review of literature and secondary data from various sources related to education financing policies and practices in Indonesia. The results of the analysis show that the main challenges in education financing management include inequality in the distribution of funds, transparency of budget use, and limited managerial capacity at the education unit level. A strategy is needed to improve financial governance, strengthen accountability, and collaboration between stakeholders to ensure that education financing can support the achievement of national education goals in a sustainable manner.*

**Keywords:** *management, education financing, efficiency, accountability, education policy*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan sebagai salah satu komponen penting dalam keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan. Pembiayaan pendidikan mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan telaah literatur dan data sekunder dari berbagai sumber terkait kebijakan dan praktik pembiayaan pendidikan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi ketimpangan distribusi dana, transparansi penggunaan anggaran, serta keterbatasan kapasitas manajerial di tingkat satuan pendidikan. Diperlukan strategi peningkatan tata kelola keuangan, penguatan akuntabilitas, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pembiayaan pendidikan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** manajemen, pembiayaan pendidikan, efisiensi, akuntabilitas, kebijakan pendidikan

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang bermutu, pemerataan, dan relevan dengan kebutuhan zaman, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan pengelolaan yang efektif. Pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang tersedia, tetapi juga bagaimana dana tersebut direncanakan, dialokasikan, digunakan, dan diawasi dalam mendukung kegiatan pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu,

manajemen pembiayaan pendidikan menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Manajemen pembiayaan pendidikan mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan pengeluaran, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana hingga pelaporan keuangan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana pendidikan menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan alokasi dana antardaerah, keterbatasan kapasitas pengelola anggaran di satuan pendidikan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Padahal, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa minimal 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Namun, besarnya alokasi dana tidak selalu diiringi dengan efektivitas penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Seiring meningkatnya tuntutan terhadap mutu pendidikan dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, analisis terhadap manajemen pembiayaan pendidikan menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat manajemen keuangan di sektor pendidikan. Dengan memahami dinamika dan tantangan manajerial dalam pembiayaan pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam rangka peningkatan mutu tata kelola pendidikan di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai praktik manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial, pandangan para pelaku pendidikan, serta dinamika pengelolaan dana pendidikan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka-angka kuantitatif.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, pejabat dinas pendidikan, serta pengelola keuangan pada lembaga pendidikan.

- Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan sekolah, dokumen perencanaan anggaran (RKAS), laporan audit, kebijakan pemerintah, serta literatur akademik yang relevan dengan manajemen pembiayaan pendidikan.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali pemahaman dan pengalaman para informan terkait pengelolaan dana pendidikan.
2. Studi dokumentasi, untuk menelaah kebijakan, laporan keuangan, dan dokumen perencanaan pembiayaan pendidikan.
3. Observasi non-partisipatif, dilakukan secara terbatas untuk mengamati proses manajemen keuangan di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan yang diteliti.

#### Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Proses ini meliputi:

1. Reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Kategorisasi data berdasarkan tema-tema seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pembiayaan.
3. Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang dianalisis.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan observasi untuk memastikan konsistensi informasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### Hasil Penelitian

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia, baik di tingkat sekolah maupun dalam kebijakan pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, studi dokumentasi, dan observasi yang dilakukan di beberapa sekolah, ditemukan beberapa temuan penting sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Anggaran yang Kurang Optimal

Perencanaan anggaran di tingkat sekolah umumnya masih terfokus pada kebutuhan rutin seperti pembayaran gaji tenaga pendidik dan operasional sekolah. Alokasi dana untuk pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pendidikan, sering kali terabaikan. Beberapa kepala sekolah menyatakan bahwa meskipun ada anggaran yang cukup besar dari pemerintah, namun mereka kesulitan untuk merencanakan penggunaan dana secara efektif karena kurangnya pelatihan dalam manajemen keuangan.

#### 2. Ketimpangan Pembiayaan Antar Daerah

Ketimpangan dalam pembiayaan pendidikan antara daerah kaya dan miskin masih menjadi masalah yang signifikan. Beberapa daerah dengan anggaran daerah terbatas mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sementara daerah dengan anggaran lebih besar dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Hal ini berakibat pada kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah.

#### 3. Pengawasan Penggunaan Anggaran yang Lemah

Pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan di tingkat sekolah dan dinas pendidikan cenderung kurang maksimal. Meskipun terdapat sistem pelaporan anggaran, banyak laporan yang tidak mencerminkan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas pengelola keuangan di tingkat sekolah dan kurangnya pelatihan mengenai tata kelola keuangan yang baik.

#### 4. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat berperan dalam pendanaan pendidikan di tingkat sekolah. Namun, banyak sekolah yang masih mengalami kesulitan dalam pengelolaannya karena

ketidakjelasan prosedur penggunaan dana BOS dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola anggaran dengan efisien.

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen pembiayaan pendidikan menghadapi berbagai tantangan, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana pendidikan.

#### 1. Perencanaan Anggaran yang Efektif

Kurangnya pelatihan dan kemampuan dalam menyusun perencanaan anggaran yang efektif di tingkat sekolah menjadi masalah utama. Sebagai solusinya, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kepala sekolah dan pengelola keuangan sekolah mengenai cara menyusun rencana anggaran yang tidak hanya mencakup kebutuhan rutin, tetapi juga pengembangan pendidikan jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan dana dapat lebih terarah dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan.

#### 2. Mengatasi Ketimpangan Pembiayaan Pendidikan

Ketimpangan pembiayaan antar daerah masih menjadi masalah yang mendalam dalam pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu lebih memperhatikan keseimbangan distribusi dana pendidikan melalui kebijakan yang lebih progresif. Alokasi dana pendidikan seharusnya memperhatikan kondisi ekonomi masing-masing daerah dan memberikan insentif kepada daerah yang memiliki kesulitan dalam membiayai pendidikan. Penggunaan dana pendidikan yang lebih merata akan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di daerah terpencil atau kurang berkembang.

#### 3. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan mengindikasikan perlunya sistem akuntabilitas yang lebih baik. Implementasi sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi dapat membantu mengawasi penggunaan dana dengan lebih efisien. Pengawasan yang melibatkan masyarakat, baik melalui forum sekolah maupun masyarakat, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Selain itu, audit internal dan eksternal yang rutin perlu dilakukan untuk

memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Optimalisasi Pengelolaan Dana BOS

Dana BOS memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung operasional sekolah, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah dengan anggaran terbatas. Namun, pengelolaan dana BOS yang belum optimal menunjukkan perlunya adanya pelatihan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pelaporan dana ini secara benar. Sekolah perlu diberikan panduan yang jelas dan transparan mengenai prosedur penggunaan dana BOS agar dapat memaksimalkan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien. Perbaikan dalam manajemen pembiayaan pendidikan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan. Permasalahan yang paling dominan antara lain adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, ketimpangan distribusi anggaran antar daerah, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk sektor pendidikan, efektivitas penggunaan dana tersebut belum optimal dan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara merata.

Dengan demikian, keberhasilan sistem pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan integritas dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Pendekatan yang sistematis, transparan, dan berbasis kebutuhan sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

#### **SARAN**

##### 1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan rutin bagi kepala sekolah, bendahara, dan pengelola dana di satuan pendidikan agar

mampu menyusun rencana anggaran yang strategis serta melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan profesional.

2. Pemerataan Alokasi Dana Pendidikan

Diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk mendukung daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, guna mengurangi kesenjangan layanan dan mutu pendidikan antar wilayah.

3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana pendidikan harus diperkuat. Implementasi sistem pelaporan digital yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi anggaran.

4. Optimalisasi Penggunaan Dana BOS

Pemerintah perlu menyempurnakan pedoman teknis penggunaan dana BOS dan memberikan fleksibilitas yang tetap terarah kepada sekolah agar dana tersebut benar-benar digunakan sesuai kebutuhan riil dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran.

5. Kolaborasi Multipihak

Sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, S. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Panduan Pengelolaan Dana BOS*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Fitriani, E., & Raharjo, T. (2021). Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(2), 135–144.

Hasbullah. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mulyasa, E. (2012). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Global*. Jakarta: Kompas.
- UNESCO. (2017). *Education Finance Watch*. Paris: UNESCO Publishing.
- Zamroni. (2011). *Pendidikan untuk Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.